

ABSTRAK

Inaya Maisarah, Hafiz Elfiansya Parawu dan Dian Lestari, 2026. *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, serta menguraikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses kolaborasi. Pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo melibatkan berbagai aktor, di antaranya BPOLBF, Dinas Pariwisata, Bappeda, Pokdarwis, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat lokal. Keterlibatan berbagai aktor tersebut diperlukan karena pengelolaan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dengan koordinasi, pembagian peran, partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dan keberlanjutan destinasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penerapan *collaborative governance* menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas lima indikator, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo telah berjalan melalui forum koordinasi, sosialisasi, pelatihan, pembinaan pelaku usaha dan UMKM, promosi destinasi, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena koordinasi antaraktor belum konsisten, keterlibatan masyarakat belum merata sejak tahap perencanaan, pembagian peran dan kewenangan belum sepenuhnya jelas, serta manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

Faktor pendukung *collaborative governance* meliputi dukungan kelembagaan, tersedianya forum koordinasi dan komunikasi, besarnya potensi pariwisata Labuan Bajo, program pembinaan dan peningkatan kapasitas, serta keterlibatan aktor lokal di tingkat destinasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan partisipasi masyarakat, ketidakjelasan pembagian peran, dan belum meratanya manfaat ekonomi pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo membutuhkan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan, peningkatan transparansi, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta evaluasi bersama agar *collaborative governance* dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Pariwisata, Labuan Bajo.